UNTUK TENAGA MEDIS HINGGA WARGA MISKIN

Vaksinasi Covid-19 Mulai November 2020

JAKARTA (KR) - Pemerintah menyiapkan sasaran prioritas penerima vaksinasi Covid-19 mulai dari tenaga medis hingga masyarakat miskin penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.

"Pertama di garda depan terdiri dari tenaga medis dan paramedis, pelayan kesehatan, termasuk TNI/Polri dan aparat hukum sekitar 3,5 juta orang," kata Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (12/10).

Kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga perangkat daerah sebanyak 5 juta orang, tenaga pendidik mulai dari Pendidikan Anak Usia Dinia (PAUD), TK, SD, SMP hingga dosen Perguruan Tinggi Swasta dan Negeri sebanyak 4,3 juta orang.

Selanjutnya aparat Pemerintah Pusat dan Daerah serta legislatif sebanyak 2,3 juta orang dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebanyak 96 juta orang dengan jumlah semuanya mencapai 102 juta orang.

Selain itu, lanjut Airlangga Hartarto, sasaran penerima vaksinasi adalah masyarakat usia 19-59 tahun, sehingga total keseluruhan mencapai 160 juta orang. Vaksinasi akan diberikan sebanyak dua dosis sehingga total kebutuhan vaksin mencapai 320 juta dosis vaksin.

Selain dari Pemerintah, lanjut Airlangga Hartarto, vaksinasi juga akan dilakukan oleh perusahaan yang melakukan kerja sama untuk vaksinasi mandiri. "Jadi ada dua langkah yaitu diberikan Pemerintah dan sisanya vaksin mandiri, seluruhnya dikontrol Kementerian Kesehatan dan Bio Farma berdasarkan Perpres yang sudah ditandatangani Presiden," kata Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Sedangkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, persiapan detail untuk program vaksinasi terus dilakukan dan akan mulai dilaksanakan vaksinasi pada November 2020. Menkes dan jajarannya telah menyiapkan Program Vaksinasi Covid-19 dan mengambil langkah untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia serta segera melakukan simulasi di beberapa Puskesmas.

Sejak akhir September 2020 juga telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi Covid-19.

"Pada tahap awal, kami akan memberikan prioritas vaksin kepada mereka yang di garda terdepan, yaitu tenaga medis dan paramedis, pelayanan publik, TNI/Polri, dan seluruh tenaga pendidik," kata Menkes. **(Ati/Lmg)-d**

MASYARAKAT HARUS BIJAK MENYIKAPI

Hoaks Covid-19 Timbulkan Kecemasan

YOGYA (KR) - Berita tidak benar atau hoaks tentang Covid-19 banyak beredar terutama di dunia maya, seperti media sosial atau media perpesanan (WhatsApp). Menurut Pengamat IT sekaligus Dosen STIE YKPN Yogyakarta Dr Wing Wahyu Winarno, dampak negatif yang ditimbulkan dari sebuah berita hoaks itu macam-macam, baik itu terkait Covid-19 atau yang lain. Orang bisa mengalami ketakutan atau kecemasan setelah membaca hoaks itu.

KR-Devid Permana

Dr Wing Wahyu Winarno

"Banyak sumber yang mengatakan bahwa kecemasan atau ketakutan itu akan menurunkan daya tahan tubuh (imun), sehingga bisa menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit, termasuk Covid-19," terang Wing dalam acara Editorial Kedaulatan Rakyat (KR), Minggu (11/10). Siaran ulang acara bisa disimak di channel Youtube Kedaulatan Rakyat TV.

Menurut Wing, setiap ada peristiwa besar yang menjadi perhatian publik, pasti muncul berita hoaks yang diproduksi oleh pihak-pihak tertentu yang menginginkan susana menjadi gaduh. Celakanya, masih banyak masyarakat Indonesia yang justru buru-buru menyebar/meneruskan berita tersebut ke teman-temannya, tanpa mengonfirmasi dulu kebenarannya. Itu paling sering dijumpai di WhatsApp Group (WAG). "Masih banyak yang merasa ingin menjadi yang pertama menginformasikan berita yang sedang heboh di WAG, meskipun belum pasti kebenarannya," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Wing, perlu ada upaya edukasi atau mengingatkan agar terlebih dahulu memastikan kebenaran sebuah berita/informasi sebelum menyebarkan/meneruskan. Cara paling mudah, jika menemui sebuah berita/informasi yang belum tahu kebenarannya, dengan menanyakan terlebih dahulu kepada teman atau pihak-pihak yang berkompeten. "Paling aman ya dengan merujuk media-media massa yang sudah kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan seperti surat kabar, televisi, radio atau situs-situs resmi," tuturnya.

Wing mengingatkan bahwa ada ancaman pidana bagi para penyebar berita hoaks, informasi menyesatkan, merugikan orang lain yang bisa dijerat dengan UU ITE. Keberadaan UU ini cukup penting agar masyarakat lebih hati-hati dan bijak dalam berinternet atau bermedia sosial. **(Dev)-d**

Rektor ..... Sambungan hal 1

Atau, dengan cara lain yakni melakukan aksi mogok dengan cuti secara bersamaan di rumah. "Aksi penolakan UU Cipta Kerja ini tetap terukur dan terarah sesuai konstitusi," kata Said, kemarin.

Opsi lain, ujarnya, sebelum UU Ciptaker ditandatangani Presiden, pihaknya meminta presiden dan DPR melakukan tinjauan ulang (review). Kepada presiden ia meminta dilakukan *executive review* dengan menerbitkan Perpu untuk membatalkan UU tersebut.

Said menegaskan, pihak buruh merasa dikhianati. Karena beberapa pasal dalam UU Ciptaker yang katanya merujuk UU Ketenagakerjaan lama ternyata tidak berubah dengan draf RUU seperti yang diinginkan pemerintah.

Rektor UGM Prof Panut Mulyono meminta mahasiswanya tidak perlu turun ke jalan. Rektor beralasan, untuk menyampaikan aspirasi atau mengkritisi suatu kebijakan, mahasiswa bisa melakukan kajian akademis dan analisis. "Saya berharap dalam masa pandemi Covid-19 seperti sekarang, seandainya ada beda pendapat atau pandangan saya imbau mahasiswa sebaiknya tidak turun ke jalan dalam menyampaikan pendapat atau aspirasinya. Karena dalam menyampaikan aspirasi bisa mengkajinya secara kritis dan akademis di kampus. Adapun bentuknya bisa dikemas berupa diskusi, FGD, seminar serta berbagai cara yang lain," kata Rektor UGM di Kompleks Kepatihan, Senin (12/10).

Panut mengungkapkan, apabila mahasiswa menyampaikan aspirasi lewat kajian kritis dan akademis di kampus, formula usulan hasil aspirasi itu bisa disalurkan ke pemerintah dan DPR. Pihak kampus dengan senang hati menemani diskusi-diskusi tersebut dan membantu menyampaikan aspirasinya. Semua itu sejalan dengan adanya surat edaran Dirjen Dikti kepada para rektor untuk membimbing mahasiswa di dalam menyampaikan aspirasinya.

Muhammadiyah Tak Ikut

Muhammadiyah menghormati masyarakat yang demonstrasi. Sebab, menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan adalah hak warga negara yang dijamin UUD. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang berdemonstrasi hendaknya mematuhi UU, tertib dan menghindari kekerasan (vandalisme). Namun Muhammadiyah tidak ada hubungan dan tidak akan ikut dalam aksi yang dijadwalkan dilaksanakan sejumlah organisasi, Selasa (13/10).

Muhammadiyah lebih fokus pada penananan Covid-19 dan dampaknya terhadap pendidikan, ekonomi dan kesehatan masyarakat," tandas Sekum PP Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mu'ti di Kantor PP Muhammadiyah, kemarin.

Hal tersebut dikemukakan terkait dengan rencana aksi kepung istana Selasa hari ini. Dikatakan Mu'ti, dalam situasi sekarang, sebaiknya semua pihak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar, termasuk demonstrasi. Aksi demonstrasi lebih banyak *madlaratnya* daripada manfaatnya. "Dalam Islam diajarkan agar meninggalkan perbuatan yang lebih banyak mengandung *madlarat* dibandingkan manfaat. Dalam hukum Islam hal yang sangat mendesak (*aham*) harus lebih diprioritaskan di atas hal yang penting *(muhim)*, " katanya.

Meski demikian Muhammadiyah tetap menghormati mereka yang melaksanakan demo dan meminta aparatur keamanan hendaknya memaksimalkan pendekatan persuasif dan humanis. Dengan begitu, tidak sampai terjadinya *clash* antara masyarakat dengan aparat. Muhammadiyah tetap bersikap kritis kepada kebijakan Pemerintah yang bertentangan dengan hukum dan perundangan-undangan, terutama yang bertentangan dengan Islam dan merugikan umat Islam. Tetapi, Muhammadiyah tak akan melengserkan Pemerintahan yang sah. Risikonya terlalu besar bagi rakyat dan masa depan bangsa. **(Sim/Fsy/Ria)-d**

60 Perusahaan ..... Sambungan hal 1

Kesadaran ketaatan tersebut ada di masing-masing pemberi kerja dan tenaga kerja sebagai antisipasi munculnya transmisi Covid-19 di lingkungan pabrik tidak terjadi," tuturnya.

Guna melengkapi model pengawasan, Aria menerapkan aplikasi Jogja Pass yang telah dirancang Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY. Aplikasi tersebut sebagai langkah guna melakukan tracing atau penelusuran apabila terjadi kasus Covid-19 maupun sebagai alat early warning system guna memitigasi penyebaran pandemi Covid-19.

"Kami belum mendapatkan laporan dari mapping 60 perusahaan di DIY tersebut yang munculnya kasus positif Covid-19 di lingkungan pekerja sejauh ini. Seandainya terjadi hal yang tidak kita harapkan, ini menjadi bagian dari pola koordinasi dengan perusahaan yang telah mempunyai SOP apabila terjadi transmisi," tandasnya.

Disnakertrans DIY maupun Disnakertrans Kabupaten/Kota se-DIY telah proaktif melakukan mapping 60 perusahaan yang berpotensi muncul penyebaran virus Korona ini sejak Agustus 2020 lalu. Pihaknya akan memperluas pemetaan menjadi 80 perusahaan di DIY pada Oktober 2020 ini. Mapping perusahaan tersebut akan di-*mantaince* kepatuhan terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19 serta tetap melaksanakan produksi dengan baik. "Secara umum perusahaan, badan usaha dan sebagainya tetap kita berlakukan model pengawasan, khususnya bagi perusahaan dengan indikasi dari banyaknya pekerja yang dimapping tersebut dilakukan pengawasan intensif monitoring dan evaluasinya. Bagi yang jumlah pekerjanya kurang di bawah 500 orang tetap diawasi, tetapi kita prioritaskan kepada perusahaan yang lebih besar dahulu karena risiko penularannya lebih tinggi," ungkapnya.

Menurut Aria, dari hasil monitoring tersebut dinilainya telah terbangun kesadaran dari pemberi kerja maupun pekerja sendiri. Terkait sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan di lingkungan kerja tetap mengacu pada amanat Pergub. Sanksi tersebut justru menjadi bagian akhir yang disosialisasikan karena pihaknya berharap penerapan adaptasi kebiasaan baru menjadi bagian dari kesadaran dari pemberi kerja dan pekerja agar produktivitas bisa terjadi di tengah pandemi Covid-19.**(Ira)-d**

Kembalikan ..... Sambungan hal 1

Sekretaris Pelaksana Pengusulan Sri Sultan HB II Pahlawan Nasional, Bagoes Poetranto menyatakan, pihak Inggris harus meminta maaf pada pihak Kraton Yogyakarta khususnya para keturunan Eyang Sepuh Sri Sultan HB II. Pernyataan Peter Carey yang menyebutkan peristiwa penyerangan pasukan Inggris ke Kraton Yogyakarta harus dimaklumi pada saat masa perang, sangat disayangkan dan membuat 'luka' trah HB II.

Menurut Bagoes Poetranto, Inggris juga harus mengembalikan aset HB II yang dirampas saat Geger Sepehi, yang mengakibatkan tewasnya para pejuang Kraton dan kerabat Sultan HB II. "Pernyataan Carey yang menyebutkan pihak Inggris tidak perlu meminta maaf dan mengembalikan harta rampasan saat itu tidaklah objektif dan kita diminta memakluminya. Kami juga tak sependapat bahwa pengasingan Eyang Sepuh HB II ke Penang merupakan salah satu bentuk pemaafan dari pihak Inggris," kata Bagoes Poetranto. **(Ati)-d**

Pencuri ..... Sambungan hal 1

Dari pengembangan petugas, R ternyata pernah melakukan pencurian 8 Air Circuit Breaker (ACB) di Gedung Mezzanine Proyek Bandara YIA 6 Juli 2019. Saat itu, R beraksi bersama H (40), warga Koja Jakarta Utara, AS (32) dari Banyuasin Sumatera Selatan, I (40) alamat Cisarua Bogor, Y (38) warga Citeurep Bogor, A (30) dan S (30) dari Randudongkal Pemalang Jateng.

Petugas kemudian berhasil mengamankan H dan AS. Sedangkan empat pelaku lainnya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). R, H dan AS dikenakan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Mereka diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. **(M-4)-d**

Kampanye ..... Sambungan hal 1

Mereka wajib membuat konten kampanye politik atas dirinya untuk disosialisasikan secara virtual oleh tim suksesnya. Konten kampanye virtual Pilkada 2020 harus berbeda dengan kampanye konvensional. Materi kampanye wajib dikemas secara ringkas dan padat. Ditayangkan lewat kanal medsos dan media digital lainnya dalam hitungan durasi pendek. Kampanye virtual sebaiknya memberi ruang dialogis agar terjalin proses interaksi dua arah. Sehingga tercipta proses komunikasi politik dua jalur: antara kandidat dengan calon pemilih.

Kampanye virtual bukan kampanye konvensional yang ditayangkan secara daring dengan mengandalkan wajah dan sederet gelar akademik namun miskin prestasi. Bukan representasi iklan politik jual diri yang diformat menjadi medium perang diksi janji politik. Bukan iklan politik berbentuk media luar ruang yang dimitoskan memiliki kekuatan superkuat di dalam menunjukkan keakuan sang kandidat. Bukan pula kampanye politik yang ditebarkan di ruang publik dan berujung menjadi sampah visual iklan politik.

Kampanye virtual dalam perspektif budaya visual menjadi debutan baru jagat komunikasi politik. Mereka mesti menghadirkan gaya tutur (verbal-visual) baru kepada calon pemilih. Keberadaannya harus memberikan inspirasi dan modal sosial yang signifikan bagi hidup dan kehidupan calon pemilih.

Kenapa dikatakan sebagai debutan baru? Karena suka tidak suka orang yang bergelut di bidang komunikasi (visual) politik harus berani mengubah gaya berkomunikasinya kepada target calon pemilih. Caranya? Mengganti strategi dan gaya berkomunikasi kepada calon pemilih. Hal ini diyakini menjadi sangat jitu saat memasuki lorong panjang kampanye politik secara virtual. Kata kuncinya, para kandidat bersama konsultan politik dan tim sukses wajib memahami perubahan perilaku dan gaya hidup calon pemilih.

Para calon pemilih secara frontal mengubah gaya hidupnya akibat terpaan pagebluk Covid-19. Sejak satu semester ini, mereka memfokuskan diri pada pemenuhan kebutuhan pokok. Mereka membuang jauh gaya hidup modern berdasarkan gengsi. Artinya, para kandidat bersama konsultan politik dan tim sukses wajib mengganti secara ekstrem konsep ëkomunikasi keinginaní untuk didekonstruksi dengan menghadirkan konsep 'komunikasi kebutuhan' secara holistik.

Hal penting lainnya, mereka perlu memasuki wilayah *personal branding*. Konsep pencitraan diri dalam konteks positif ini sepatutnya dipertajam dalam wujud *social movement* yang digelar secara virtual. Penampakan visual seperti itu sebaiknya ditonjolkan secara heroik untuk merepresentasikan konsep 'komunikasi kebutuhan'. Aktivitas virtual komunikasi politik berdasarkan konsep *personal branding*†sangat penting dijalankan guna mendongkrak tingkat elektabilitas para kandidat yang bertarung dalam pertandingan politik Pilkada 2020.

(Penulis adalah pemerhati budaya visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta)-d

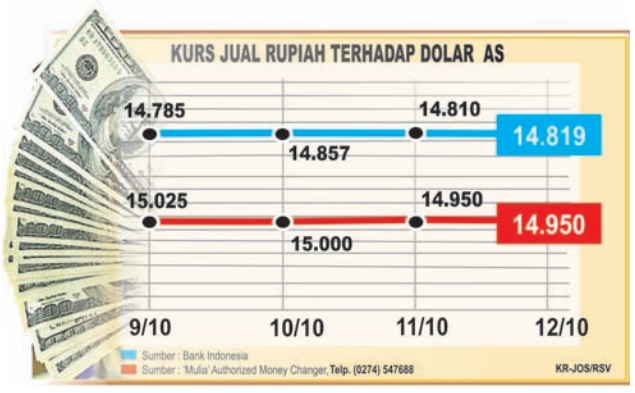

Prakiraan Cuaca Rabu, 13 Oktober 2020

Lokasi	Cuaca: Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					24-31	60-95
Sleman					23-30	65-95
Wates					24-31	60-95
Wonosari					24-31	60-95
Yogyakarta					24-30	65-95

Cerah, Berawan, Udara Kabur, Hujan Lokal, Hujan Petir

Grafis : Arko

Disabilitas dalam Layar Kaca

Kadek Kiki Astria, SIKom MA
Dosen Ilmu Komunikasi
Universitas Amikom Yogyakarta

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

"**MEREKA** yang berkebutuhan khusus aja bisa masa kita enggak" adalah salah satu kalimat motivasi yang masih sering kita dengar sampai saat ini tak terkecuali di media televisi. Penggunaan kalimat motivasi tersebut memang terdengar wajar. Namun jika dimaknai kalimat tersebut terkesan menghakimi para penyandang disabilitas yang seolah-olah tidak pantas untuk mampu melakukan hal-hal yang orang-orang pada umumnya mampu lakukan.

Saat ini banyak acara di televisi yang memanfaatkan keadaan fisik seseorang sebagai strategi untuk meningkatkan rating acara mereka. Mulai dari acara bergendre komedi, sinetron, bahkan reality show. Munculnya program-program reality show yang menampilkan kekurangan seseorang baik dari segifisk maupun dari segi fiansial ini semakin hari semakin banyak. Bergam versi yang digunakan, mulai dari mengikuti keseharian mereka, menyamar untuk melihat sifat mereka, berpura-pura minta pertolongan, sampai memberikan bantuan secara langsung.

Sayangnya program-program yang bertujuan untuk memotivasi penonton agar selalu bersyukur dan berbuat baik ini kurang memperhatikan hal-hal seperti penggunaan kalimat dan fokus pembahasannya. Kerap kali talent dalam program-program itu mengemas perjuangan para disabilitas dalam kesedihan yang berlebihan tanpa mempedulikan perasaan mereka. Kerap kali para penyandang disabilitas dalam sketsanya di setting berlebihan untuk tegar menjalani cobaan dari lingkungan mereka seperti di hina, dikucilkan, ditertawakan, dan lain sebagainya. Hal ini sangat disayangkan karena seolah-olah para penyandang disabilitas wajar untuk diperlakukan seperti itu.

Yang juga sangat miris adalah program tayangan televisi bergendre komedi yang seolah-olah tak terkendali dengan lawakan mereka. Haji Bolot misalnya, pelawak asli Betawi yang mengkritik petinggi-petinggi Negara yang seolah-olah tidak mendengar aspirasi rakyat kecil melalui lawakannya dengan berperan sebagai orang yang tuna rungu dan selalu mengenakan pakaian ala pejabat saat ini menjadi bahan eksploitasi akan kekurangannya dalam hal pendengaran. Padahal yang kita ketahui dalam P3SPS Bab XI Pasal 15 ayat 1 dan 2 telah menyebutkan bahwa lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang mengertawakan, merendahkan, dan menghina orang atau kelompok dengan kondisi fisik tertentu. Tuna rungu sebagai identitas yang diciptakan oleh Haji Bolot justru menjadi bahan olokan yang justru malah sangat dinikmati oleh penontonnya.

Hal tersebut justru membuat televisi di Indonesia saat ini tidak ramah kepada para penyandang disabilitas dengan menbiarkan eksploitasi kepada penyandang diabilitas tetap ditayangkan. Seharusnya televisi bisa memberikan ruang untuk para penyandang disabilitas dengan adil.

Televisi memang memberikan ruang bagi para penyandang disabilitas yang berprestasi namun disisi lain ruang tersebut kerap menjadi tolak ukur motivasi orang lain untuk melakukan hal lebih yang seolah-olah penyandang disabilitas tidak pantas untuk melakukannya. ***